

PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Agus Salim Salabi

Dosen tetap IAIN Loeksoemawi Aceh

Email; salim.salabi@gmail.com

Abstract

This Policy to Strengthen Character Education is integrated in the National Movement for Mental Revolution (GNRM), namely changing the way of thinking, acting, and acting for the better. The main values of Strengthening Character Education are religious, nationalist, independent, mutual cooperation, integrity. These values want to be instilled and practiced through the national education system so that they are known, understood, and applied in all aspects of life at school and in society. Strengthening Character Education was born out of awareness of the challenges ahead which are increasingly complex and uncertain, but at the same time seeing that there is much hope for the future of the nation. This requires educational institutions to prepare students scientifically and personally, in the form of individuals who are solid in moral, spiritual and scientific values. Understanding the background, urgency, and basic concepts of Strengthening Character Education is very important for school principals to be able to apply them according to the educational context in their respective regions

Key Word : religious, nationalist, independent, gotong royong, integrity

Abstrak

Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama Penguatan Pendidikan Karakter adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Penguatan Pendidikan Karakter lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual dan keilmuan. Memahami latar

belakang, urgensi, dan konsep dasar Penguatan Pendidikan Karakter menjadi sangat penting bagi kepala sekolah agar dapat menerapkannya sesuai dengan konteks pendidikan di daerah masing-masing.

Kata Kunci: Pengembangan Lembaga, Pendidikan Karakter

Pendahuluan

Pemerintah telah mencurahkan perhatian yang besar untuk menjadikan lembaga pendidikan memiliki kualitas yang lebih baik, yang tidak hanya terfokus dalam mengembangkan kemampuan peserta didik secara kognitif saja tetapi juga mengembangkan kualitas dan kemampuan peserta didik secara afektif (sikap dan perilaku) serta psikomotorik. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia secara umum yang menginginkan para lulusan setiap lembaga pendidikan selain memperoleh prestasi akademis juga mempunyai prestasi yang baik dalam sikap dan perilakunya.

Indonesia mengalami keterbukaan dan interaksi global yang menuntut pendidikan nasional perlu ditata kembali sehingga mampu memberi kontribusi yang berarti bagi kemajuan Indonesia. Penataan kembali pendidikan nasional Indonesia dapat dimulai dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi.¹ Dengan karakter yang kuat ditambah dengan kompetensi yang baik, maka berbagai tantangan dapat diatasi. Termasuk juga dalam hal mengantisipasi krisis moral yang ada.

Dewasa ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita tentang penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah, menengah, dan bahkan kalangan intelektual. Sepanjang tahun 2017-2018 media dipenuhi dengan berita pembegalan yang dilakukan para remaja dan geng motor, tawuran antarpelajar, peredaran dan penyalahgunaan narkoba oleh para artis, korupsi para pejabat dan wakil rakyat serta perilaku negatif lainnya kerap menghiasi halaman berita. Seluruh perilaku tersebut menjadikan negara berada dalam krisis multidimensional yang tak kunjung usai yang diperburuk dengan krisis budi pekerti para pemimpin bangsa yang tentunya akan berimbas kepada generasi muda.

¹ Tim Penyusun, *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), hal. 2.

Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Dalam mengatasi kondisi tersebut, maka diperlukan pemahaman dan langkah untuk membangun kembali karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan karakter harus menjadi fondasi bangsa dalam upaya membantu perkembangan kepribadian setiap masyarakatnya. Pendidikan karakter merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah berakhir. Dan untuk mencapai tujuan pendidikan karakter, diperlukan manajemen yang baik dan sinergis di antara berbagai komponen pendidikan yang terlibat baik yang bersifat formal, nonformal, informal, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat.²

Pelaksanaan pendidikan karakter telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.³

Pembahasan

Prinsip-prinsip Program Pendidikan Karakter (PPK) Menurut Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017

a. Pendidikan Karakter

Gede Raka menyatakan,⁴ bahwa meningkatnya kompetensi manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak dengan sendirinya disertai peningkatan kebajikan yang ada di hati manusia. Kompetensi yang tidak disertai peningkatan kebajikan cenderung akan membawa umat manusia pada keadaan yang mengancam kualitas kehidupannya bahkan keberadaannya. Oleh

² Zahri C. Harun, *Manajemen Pendidikan Karakter* (Jurnal), Tahun III. Nomor 3. (Universitas Syiah Kuala, 2013), hal. 302.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Armas Duta Jaya, 2004.

⁴ Gede Raka et.al., *Pendidikan Karakter di Sekolah dari Gagasan ke Tindakan* (Jakarta : Gramedia, 2011), hal. 14.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

karena itu, salah satu tawaran solusinya adalah melalui pendidikan karakter di sekolah. Adapun Tujuan pendidikan yang benar menurut King dalam Lickona adalah membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual dan berkarakter "*Intelligence plus character, that is the true education*".⁵Sementara Ki Hadjar Dewantara,⁶telah menandakan secara eksplisit bahwa "Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita".

Karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain.⁷ Pengertian karakter selanjutnya adalah merupakan kata yang merujuk pada kualitas orang dengan karakteristik tertentu.⁸ Dapat dikatakan, bahwa karakter adalah sifat yang mewujudkan dalam diri seseorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku terpuji dan mengandung kebajikan.

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter adalah melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab (bunyi Pasal 3 Perpres Nomor: 87 Tahun 2017).⁹ Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Dalam Perpres ini disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga,

⁵ T. Lickona, *Character matters: how to help our children develop good judgment, integrity and other essential virtues*, (New York: Toughstone, 2004), hal. 35.

⁶ Ki Hadjar Dewantara, *Bagian I Pendidikan*, (Jogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1962).

⁷ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 3.

⁸ Dharma Kesuma, dkk. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 24.

⁹ <http://setkab.go.id/inilah-materi-perpres-no-87-tahun-2017-tentang-penguatanpendidikan-karakter/>. Diakses 04-12-2017.

dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Adapun pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.¹⁰ Pendidikan karakter juga merupakan sebuah usaha penanaman dan pengembangan karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya baik di keluarga, masyarakat, dan negara.¹¹ Pengertian lain menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya serta adat istiadat.¹² Pendidikan karakter juga dimaknai dengan penciptaan lingkungan sekolah yang membantu peserta didik dalam perkembangan etika, tanggung jawab melalui model dan pengajaran karakter yang baik melalui nilai-nilai universal.¹³

Merujuk pada banyaknya pengertian tentang pendidikan karakter di atas, dapat disimpulkan, bahwa pendidikan karakter adalah upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis oleh pendidik terkait penanaman nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga dan negara yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya serta adat istiadat agar menjadi manusia sempurna (*insān kāmil*).

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu

¹⁰ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*, (Bandung: BPMIGAS dan Energi, 2004), hal. 95.

¹¹ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 36.

¹² Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan ...* hal. 28.

¹³ M.W Berkowitz and Bier, *What Works in Character Education: A Research-driven Guide for Educators*, (Washington, DC: Univesity of Missouri-St Louis, 2005), hal.7.

dikembangkan sebagai prioritas PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Religius

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.

Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antarpemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

2. Nasionalis

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

3. Mandiri

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.

¹⁴ Tim Penyusun, *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter ...*, hal. 8-9.

Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

4. Gotong Royong

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.

Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

5. Integritas

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.

Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas).

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.

b. Prinsip-prinsip Penguatan Pendidikan Karakter

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan/sekolah dapat tercapai dengan keterlibatan semua warga sekolah, keluarga, dan anggota masyarakat. Bahkan Wening (2012)¹⁵ dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa pendidikan nilai merupakan implementasi pendidikan karakter yang diperoleh dari lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Keluarga

¹⁵ S. Wening, *Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai* (Jurnal Pendidikan Karakter, 2012), hal. 64.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

merupakan lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter yang pertama yang harus terlebih dahulu diberdayakan, sedangkan pendidikan karakter di sekolah ditekankan pada penanaman moral, nilai-nilai estetika, dan budi pekerti yang luhur.

Di samping itu lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap karakter atau watak seseorang. Mengingat keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, keberadaan contoh (*role model*) sangat berarti. Misalnya orang tua, guru, dan para *public figur* harus menjadi contoh langsung bagi anak atau peserta didik. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw., “telah ada pada diri Rasulullah suri teladan (*laqad kāna lakum fī Rasūlillāh uswah ḥasanah*)” dalam hal berperilaku/berakhlak di mana misi utama beliau diutus kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak (*innamā bu’istu liutammim makārim al-akhlāq*).

Peran guru sebagai *role model* di sekolah sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan pendidikan karakter. Pendidik yang berkarakter kuat dan cerdas diperlukan dalam situasi dan kondisi bangsa yang masih dilanda krisis multidimensi. Sehingga kehadiran pendidik sebagai *key actor in the learning process*, yang profesional serta memiliki karakter kuat dan cerdas, akan tercipta sumber daya manusia yang merupakan pencerminan bangsa yang berkarakter kuat dan cerdas, serta bermoral luhur.

Efektivitas penanaman nilai-nilai budi pekerti juga sangat dipengaruhi oleh ketepatan pendekatan yang dipilih guru, misalnya pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*).¹⁶ Pendekatan ini memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan ini sangat efektif untuk pendidikan di alam demokrasi.

Di sisi lain keberhasilan pendidikan karakter salah satunya adalah menghapus dikotomi bahwa karakter adalah tanggung jawab guru agama dan guru kewarganegaraan. Sesungguhnya keberhasilan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama sehingga semua guru harus membangun sinergi antar-mata-pelajaran.¹⁷ Mulyasa

¹⁶ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 23.

¹⁷ *Ibid.*

(2011)¹⁸ memiliki pendapat yang senada bahwa pengintegrasian pendidikan karakter melalui proses pembelajaran semua mata pelajaran menjadi model yang banyak diterapkan. Model ini ditempuh dengan paradigma bahwa semua guru adalah pendidik karakter (*character educator*). Artinya guru adalah contoh nyata bagi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter yang diajarkan.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Presiden No. 87/2017 sebagai berikut:¹⁹

a. Prinsip 1–Nilai-nilai Moral Universal

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya.

b. Prinsip 2–Holistik

Gerakan PPK dilaksanakan secara holistik, dalam arti pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.

c. Prinsip 3–Terintegrasi

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan.

d. Prinsip 4–Partisipatif

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam gerakan PPK, menyepakati

¹⁸ Mulyasa. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁹ Tim Penyusun, *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter ...*, hal. 10-12.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

bentuk dan strategi pelaksanaan gerakan PPK, bahkan pembiayaan gerakan PPK.

e. Prinsip 5–Kearifan Lokal

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.

f. Prinsip 6–Kecakapan Abad XXI

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (*collaborative learning*).

g. Prinsip 7–Adil dan Inklusif

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia.

h. Prinsip 8–Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif.

i. Prinsip 9–Terukur

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan.

c. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Pelaksanaan pendidikan karakter dibuat mulai dari pemerintah pusat sampai ke tataran keluarga. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Strategi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan karakter dimulai dari pemerintah pusat (*top-down*) dengan kebijakannya tentang pelaksanaan pendidikan karakter, strategi dari pengalaman praktisi (*bottom-up*) seperti yang dilakukan beberapa lembaga yang konsen dengan perbaikan karakter bangsa.

Gerakan PPK diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

yang melakukan koordinasi sektoral antarkementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan berperan menetapkan kebijakan gerakan PPK.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota berperan sebagai pendamping, pembina, dan pengarah satuan pendidikan dalam pelaksanaan PPK yang dapat dilaksanakan secara integratif dan kolaboratif. Dalam buku Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama²⁰ dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Integratif* adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan karakter dengan substansi mata pelajaran secara kontekstual (dimulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan penilaian). Sedangkan *kolaboratif* adalah pembelajaran yang mengkolaborasikan dan memberdayakan berbagai potensi sebagai sumber belajar atau pelibatan masyarakat yang mendukung penguatan pendidikan karakter.

Gerakan PPK yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya sampai dengan satuan pendidikan dapat melibatkan berbagai pelaksana dan pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peranan

²⁰ *Ibid.*, hal. 19.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

masing-masing. Fungsi dan peranan masing-masing pihak dideskripsikan sebagai berikut:²¹

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. membuat peraturan tentang pelaksanaan gerakan PPK;
 - b. menyusun kebijakan pelaksanaan gerakan PPK;
 - c. melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan kementerian/lembaga terkait lainnya;
 - d. menyusun dan mengembangkan materi PPK;
 - e. melakukan sosialisasi dan menumbuhkan inisiasi pelaksanaan gerakan PPK;
 - f. melaksanakan pengembangan SDM PPK;
 - g. memberikan dukungan sarana dan prasarana program PPK;
 - h. memmmberikan pendampingan pelaksanaan program PPK; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. melaksanakan koordinasi implementasi pelaksanaan program PPK dengan dinas pendidikan kabupaten/kota;
 - b. melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat provinsi;
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan program PPK;
 - d. memberikan pendampingan pelaksanaan program PPK; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - a. melaksanakan koordinasi implementasi pelaksanaan program PPK dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan pendidikan;
 - b. melakukan sinergi dan implementasi kebijakan gerakan PPK dengan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota;
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan program PPK pada satuan pendidikan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana program PPK pada satuan pendidikan;

²¹ Fungsi dan peranan masing-masing pihak secara detail dapat dibaca pada Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), hal.21-25.

- e. memberikan pendampingan pelaksanaan program PPK pada satuan pendidikan; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK di satuan pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy seusai pembukaan Pertemuan Ke-49 Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) di Jakarta 25 Juli 2017 (Kompas, 26/7/2017) menyampaikan, bahwa peran sekolah adalah mensinergikan keluarga dan masyarakat untuk aktif dalam penguatan pendidikan karakter.²² Relasi masyarakat dan sekolah cenderung saling mempengaruhi. Jika peran masyarakat tidak ada, maka sekolah akan bekerja sendirian dalam mendidik siswa.

Peran masyarakat dalam pendidikan sudah ditulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tepatnya pada Bab XV pasal 54 yang yaitu: (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga organisasi profesi, pengusaha dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Peran komunitas masyarakat serta organisasi profesi dalam penguatan pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan: (a) memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program PPK, (b) memberikan dukungan pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan program PPK, (c) menjadi mitra dan/atau relawan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program PPK sesuai dengan kompetensi dan profesi masing-masing, dan (d) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK.

Dalam rangka penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:²³

1. Memperkuat peranan Komite Sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan.
2. Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat

²² <https://geotimes.co.id/opini/penguatan-pendidikan-karakter-masyarakat-berbuat-apa>, di akses pada 04-12-2017.

²³ Tim Penyusun, *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter ...*, hal. 16.

seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

3. Mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM.
4. Mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya.

d. Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Akademik dan Non-Akademik

Program penguatan pendidikan karakter seyogyanya diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah/madrasah mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penguatan pendidikan karakter dituangkan dalam bentuk dokumen dan disusun dengan melibatkan komponen warga sekolah (pendidik, peserta didik, wali peserta didik, masyarakat, dan *stakeholder*).

Pengintegrasian PPK dalam kurikulum mengandung arti bahwa pendidik harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK ke dalam proses kegiatan akademik maupun non akademik. Pengintegrasian nilai-nilai utama karakter dimaksudkan untuk menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai utama PPK. Gerakan PPK disesuaikan dengan kurikulum pada satuan pendidikan masing-masing dan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:²⁴

1. Mengintegrasikan pada mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Sebagai kegiatan intrakurikuler²⁵ dan kokurikuler,²⁶ setiap guru menyusun dokumen perencanaan pembelajaran berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai mata pelajarannya masing-

²⁴ *Ibid.*, hal. 13-14.

²⁵ Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah secara teratur dan terjadwal, yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik. Program intrakurikuler berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Dasar yang harus dimiliki peserta didik yang dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari sesuai dengan kalender akademik.

²⁶ Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang terkait dan menunjang kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan memperdalam materi intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dapat berupa penugasan, proyek, ataupun kegiatan pembelajaran lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh peserta didik.

masing.

Nilai-nilai utama PPK diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sesuai topik utama nilai PPK yang akan dikembangkan/dikuatkan pada sesi pembelajaran tersebut dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Misalnya, mata pelajaran IPA untuk SMP mengintegrasikan nilai nasionalisme dengan mendukung konservasi energi pada materi tentang energi.

2. Mengimplementasikan PPK melalui kegiatan ekstrakurikuler²⁷ yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pada kegiatan ekstrakurikuler, satuan pendidikan melakukan penguatan kembali nilai-nilai karakter melalui berbagai kegiatan. Kegiatan ekskul dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pihak lain/lembaga yang relevan, seperti PMI, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, museum, rumah budaya, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas satuan pendidikan.
3. Kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. Kegiatan-kegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran untuk memperkuat pembentukan karakter sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan.

e. Program Penguatan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

Pesantren selama ini telah dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang paling mandiri. Kemandirian itu hendaknya menjadi doktrin yang dipertahankan dan harus ditanamkan kepada para peserta didik (santri). Tujuannya adalah agar mereka mampu hidup secara mandiri ketika terjun di tengah-tengah masyarakat.²⁸ Kemandirian diharapkan ada pada diri para santri merupakan bagian dari pendidikan karakter yang didapat dalam kehidupan pesantren.

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional ke lima *Rabithah Ma'hadul Islamiah* (KEP. MUKERNAS V RMI) Nomor: 13/MUKERNAS V/1996, tentang” Deklarasi Jati Diri dan Wawasan

²⁷ Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran (intrakurikuler). Aktivitas ekstrakurikuler berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kearifan lokal, dan daya dukung yang tersedia.

²⁸ Mujammil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 134.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Kepesantrenan” dinyatakan, bahwa pondok pesantren sesungguhnya memiliki tiga peran dan fungsi yaitu:²⁹

1. Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ajaran Islam, pondok pesantren ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang handal, serta dilandasi dengan iman dan takwa yang kokoh.
2. Sebagai lembaga perjuangan dan dakwah islamiyah, pondok pesantren bertanggung jawab mensyiarkan agama Allah dalam rangka *'izzatul islām wal muslimīn*, sekaligus ikut berpartisipasi aktif dalam membina kehidupan beragama serta meningkatkan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Sebagai lembaga pengembangan dan pengabdian masyarakat, pondok pesantren berkewajiban mendermabaktikan peran, fungsi dan potensi yang dimilikinya guna memperbaiki kehidupan serta memperkuat pilar-pilar eksistensi masyarakat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, beradab, sejahtera dan demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan pesantren memberikan kontribusi penting terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Kontribusi ini merupakan perwujudan kerjasama yang baik antara pesantren dengan masyarakat. Sehingga peran pesantren bisa menjadi *agent of chance* bagi kehidupan dalam penanaman nilai-nilai karakter peserta didiknya. Pondok pesantren menjadi lembaga yang multi aset dan memiliki banyak fungsi yang beragam. Pesantren yang awalnya merupakan lembaga tradisional mampu mengembangkan fungsinya sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama.³⁰ Di lain sisi, Azyumardi Azra dalam Abuddin Nata menawarkan tiga fungsi pesantren, yaitu: 1) transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, 2) pemeliharaan tradisi Islam, dan 3) reproduksi ulama.³¹

Dengan berbagai fungsi potensial yang ada pada pesantren, menjadikannya lembaga pendidikan Islam yang memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi

²⁹ Siradj, et al, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pengembangan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 300.

³⁰ H. Hirokoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*. terj. Umar Basalim, dkk., (Jakarta: P3M, 1987), hal. 232.

³¹ Abuddin Nata, (editor), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hal. 112.

rujukan moral.³² Karenanya sangat wajar dikatakan, bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang ideal dalam penguatan pendidikan karakter. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip pendidikan pesantren. Nurcholish Madjid dalam Abuddin Nata (2001)³³ menjelaskan setidaknya ada dua belas prinsip yang melekat pada pendidikan pesantren, yaitu: 1) teosentrik, 2) ikhlas dalam pengabdian, 3) kearifan, 4) kesederhanaan (sederhana bukan berarti miskin), 5) kolektifitas (*barākatul jamā'ah*), 6) mengatur kegiatan bersama, 7) kebebasan terpimpin, 8) kemandirian, 9) tempat menuntut ilmu dan mengabdikan (*talabul 'ilmi lil'ibādah*), 10) mengamalkan ajaran agama, 11) belajar di pesantren bukan untuk mencari sertifikat/ijazah saja, dan 12) kepatuhan terhadap kyai.

Relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan pesantren di atas, tergambar jelas program penguatan pendidikan karakter di pondok pesantren. Karenanya Masyhud dan Khusnuridlo (2003)³⁴ menyatakan tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, sebagai pelayan masyarakat mandiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat, dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.

Diyakini bahwa pesantren merupakan wadah penguatan pendidikan karakter bangsa. Pesantren dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun moralitas dan karakter bangsa, karena pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki potensi yang luas dalam pembentukan moral. Di mana potensi tersebut adalah pelaksanaan pembinaan santri selama 24 jam dengan cara tinggal di asrama, yang memungkinkan kyai dan pendidik dapat mengontrol perilaku santri dan mengarahkan sesuai dengan akhlak Islam.

Salah satu bentuk dan upaya kemajuan pesantren adalah dengan melengkapi berbagai perangkat kelembagaan di internalnya sesuai kemampuan dan kebutuhan yang sedang dihadapinya, khususnya yang terkait kepentingan masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya.³⁵

³² *Ibid.*, hal. 113.

³³ *Ibid.*

³⁴ M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hal. 92-93.

³⁵ MU YAPPI, *Manajemen Pengembangan Pondok Pesantren*. Cet.1, (Jakarta: Media Nusantara, 2008), hal.1.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Pesantren harus mampu melakukan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dalam menyiapkan peserta didik yang memiliki kualitas pendidikan yang bukan saja memiliki *soft skills* dengan menunjukkan kecakapan hidup dan kompetensi yang meliputi pemahaman dan penghayatan pengetahuan, keterampilan, namun sikap, dan juga nilai-nilai pendidikan karakter juga harus melekat sebagai kebutuhan peserta didik (santri) dalam kehidupannya dan tuntutan yang ada di masyarakat.

Nilai-nilai pendidikan karakter yang diperoleh di lingkungan pesantren merupakan modal yang seharusnya dimiliki oleh semua orang dalam bentuk kejujuran, tanggung jawab, berlaku adil, kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi, toleran, hormat terhadap sesama, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memecahkan masalah, dan sebagainya.

Pesantren yang biasa juga disebut dengan pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang sangat berpotensi dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) para santri. Pondok dan pesantren pada dasarnya merupakan dua kata yang sering penyebutannya tidak dipisahkan menjadi “pondok pesantren”, yang berarti keberadaan pondok dalam pesantren, ia merupakan wadah pengemblengan, pembinaan, dan pendidikan serta pengajaran ilmu pengetahuan.³⁶ Pesantren pada umumnya merupakan sekolah Islam berasrama di mana para peserta didiknya yang disebut santri belajar sekaligus tinggal di asrama/pondokan yang disediakan oleh pihak pesantren.

Kehidupan berasrama memberikan berbagai manfaat antara lain interaksi antara guru dan murid bisa berjalan secara intensif, memudahkan kontrol terhadap kegiatan murid, menimbulkan stimulasi atau rangsangan belajar dan memberi kesempatan yang baik bagi pembiasaan sesuatu. Asrama menjadi satu aspek penting dalam keberlangsungan pesantren, karenanya pengelolaan dan pemberdayaan semua komponen yang ada menjadi hal penting untuk terus dipelajari. Dalam konteks ini, pengelolaan tidak hanya mengacu pada sejumlah aturan dan tata tertib hidup berasrama, tapi terutama pada bagaimana asrama dikelola sebagai bagian yang mendukung tujuan pembelajaran dan Penguatan Pendidikan Karakter.

³⁶ Ghozali, M. Bahri, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: CV. Prasasti, 2003), hal. 20.

Asrama seyogyanya dijadikan sebagai tempat yang kondusif bagi santri untuk belajar di tengah ketiadaan orang tua mereka. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik dan nyaman sehingga para santri bisa mengikuti proses pembelajaran dan aktivitas harian secara maksimal. Untuk menciptakan suasana asrama yang baik, nyaman, dan kondusif, para pengasuh asrama harus memenuhi beberapa kualifikasi guna mencapai tujuan pendidikan yang ditargetkan. Guru asrama misalnya, diharapkan memiliki kepekaan tinggi, kemampuan memahami psikologi anak, dan keterampilan membangun hubungan interpersonal.³⁷

Upaya Penguatan Pendidikan Karakter di lingkungan pondok pesantren sangat efektif dengan mengacu pada pengelolaan rutinitas harian santri. Secara sadar ataupun tidak, pondok pesantren dengan asrama santri dan pengelolaannya dapat menghadirkan ragam kegiatan dan rutinitas yang memiliki nilai-nilai PPK bagi penghuniya mulai dari kegiatan bangun tidur sampai dengan tidur kembali.

Adapun kegiatan di lingkungan asrama yang biasanya menjadi PPK, diawali dengan bangun tidur, di mana para pengurus asrama (yang biasanya adalah santri senior) membangunkan para santri 30 menit sebelum azan subuh dikumandangkan, kemudian para piket kamar yang biasanya berjumlah dua sampai dengan tiga orang merapikan kasur dan membersihkan kamar.

Meng-antre sebelum makan, menerima jatah makan secukupnya, dan mencuci piring setelahnya, membaca Alquran selepas salat asar berjamaah, di mana para pengurus asrama melakukan pengawasan dan mengajari dan membimbing santri-santri yang terbilang belum mampu/cakap membaca Alquran secara rutin juga dapat menjadi PPK. Begitu juga dengan olah raga mandiri, olah raga berkelompok yang terjadwal, bersantai, belajar, serta kegiatan mandiri lainnya di sore hari seperti mencuci dan merapikan pakaian (tak ada binatu/*laundry* dan strika-an). Namun para santri dapat tampil rapi saat berpakaian. Cangkir yang diisi air panas dijadikan setrikaan atau cukup dengan melipat pakaian yang kemudian diletakkan di bawah kasur saat hendak tidur di malam hari diyakini dapat menjadikan pakaian sedikit rapi.

Berikutnya adalah kegiatan jamaah magrib, kemudian dilanjutkan dengan membaca Alquran di mana para pengurus asrama kembali berperan sebagai guru pembimbing bagi adik-adiknya. Selanjutnya

³⁷ Ahmad Baedowi dkk, *Panduan Pengelolaan Asrama*, (Jakarta: Yayasan Sukma, 2005), hal. 22.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

belajar mandiri atau belajar dengan para wali kelas (*muwājahah*) sampai menjelang waktu tidur malam (pukul 22.30), para santri wajib kembali ke asrama dan menuju kamar bersiap untuk tidur sambil menunggu para piket kamar menyusun kasur (biasanya setiap malam para santri tidak tidur di posisi yang sama seperti malam sebelumnya).

Semua pengalaman dan aktivitas yang berproses di asrama santri telah memberikan pesan dan nilai-nilai pendidikan karakter yang, berupa sifat mewujudkan dalam diri seseorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku terpuji dan mengandung kebajikan yang biasanya terdapat dalam kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*).

Kesigapan para santri dalam mengganti pakaian dan menyesuaikan dengan program atau kegiatan yang dilalui adalah cerminan karakter bersih, rapi, dan proporsional. Kesadaran dan kesigapan piket kamar merapikan dan membersihkan kamar di subuh hari dan menyusun kasur untuk persiapan tidur di malam hari adalah cerminan karakter tanggung jawab dan peduli. Para pengurus asrama dituntut untuk amanah sebagai pengurus (senior) sekaligus guru ternyata telah mengajarkan mereka bukan saja menjadi pengayom, tapi juga menempa mereka mampu berlaku adil dan mampu mengambil putusan.

Makan di dapur umum yang selalu diiringi dengan antrian panjang dan mencuci piring telah mengajarkanku kedisiplinan, kesabaran, tenggang rasa, kebersihan, dan tanggung jawab. Olah raga mandiri atau berkelompok mengajarkan para santri peduli akan kesehatan diri, menghargai prestasi, dan komunikatif. Mencuci, menjemur, melipat, merapikan pakaian mengajarkan makna hidup mandiri dan rapi. Belajar mandiri atau ber-*muwājahah* dengan wali kelas mengajarkanku gemar membaca dan *ta'zīm*³⁸ pada guru. Selain kegiatan yang tersebut di atas, tentunya banyak lagi program-program di lingkungan asrama santri yang dapat digali lebih mendalam

Penutup

Mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter adalah melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta

³⁸ Penghormatan

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut, telah ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Pendidikan karakter adalah upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis oleh pendidik terkait penanaman nilai-nilai perilaku peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga dan negara yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya serta adat istiadat agar menjadi manusia sempurna (*insān kāmil*).

Terdapat lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas PPK sebagai berikut: 1) religius, 2) nasionalis, 3) mandiri, 4) gotong royong, dan 5) Integritas. Sementara itu Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip: 1) nilai-nilai moral universal, 2) holistic, 3) terintegrasi, 4) partisipatif, 5) kearifan lokal, 6) kecakapan abad XXI, 7) adil dan inklusif, 8) selaras dengan perkembangan peserta didik, 9) terukur.

Gerakan PPK diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan koordinasi sektoral antarkementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan berperan menetapkan kebijakan gerakan PPK. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota berperanan sebagai pendamping, pembina, dan pengarah satuan pendidikan dalam pelaksanaan PPK yang dapat dilaksanakan secara integratif dan kolaboratif.

Dalam rangka penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut: 1) memperkuat peranan Komite Sekolah dan orang tua, 2) melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan, 3) mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program, 4) mensinkronkan program dan kegiatan.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Program penguatan pendidikan karakter seyogyanya diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah/madrasah melalui tiga cara, yaitu: 1) mengintegrasikan PPK pada mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran muatan lokal melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, 2) mengimplementasikan PPK melalui kegiatan ekstrakurikuler, 3) kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah.

Diyakini bahwa pesantren merupakan wadah penguatan pendidikan karakter bangsa. Pesantren dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun moralitas dan karakter bangsa, karena pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki potensi yang luas dalam pelaksanaan pembinaan dan pembentukan moral santri selama 24 jam, yang memungkinkan kyai dan pendidik dapat mengontrol perilaku santri dan mengarahkan sesuai dengan akhlak Islam.

Upaya Penguatan Pendidikan Karakter di lingkungan pondok pesantren sangat efektif dengan mengacu pada pengelolaan rutinitas harian santri. Secara sadar ataupun tidak, pondok pesantren dengan asrama santri dan pengelolaannya dapat menghadirkan ragam kegiatan dan rutinitas yang memiliki nilai-nilai PPK bagi penghuniya, mulai dari kegiatan bangun tidur sampai dengan tidur kembali.

Daftar Pustaka

- Baedowi, Ahmad dkk. (2005). *Panduan Pengelolaan Asrama*. Jakarta. Yayasan Sukma.
- Bahri, Ghozali, M. (2003). *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta. CV. Prasasti.
- Berkowitz, M.W, and Bier. (2005). *What Works In Character Education: A Research-driven guide for educators*. Washington, DC: Univesity of Missouri-St Louis.
- Gunawan, Heri. (2014). *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung. Alfabeta.
- Harun, Zahri, C. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jurnal. Universitas Syiah Kuala. Tahun III. Nomor 3.
- <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/1827>. diakses pada 04-12-2017.
- <https://geotimes.co.id/opini/penguatan-pendidikan-karakter-masyarakat-berbuat-apa>, diakses pada 04-12-2017.

- <https://hidarya.wordpress.com/2017/09/21/perpres-87-tahun-2017/>. Diakses pada 04-12-2017.
- <http://internasional.kompas.com>. Diakses pada 04-12-2017.
- <http://setkab.go.id/inilah-materi-perpres-no-87-tahun-2017-tentang-penguatan-pendidikan-karakter/>. Diakses 04-12-2017.
- Ki Hadjar Dewantara. 1962. *Bagian I Pendidikan*. Jogjakarta. Majelis Luhur Taman Siswa.
- Kesuma, Dharma dkk. (2012). *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Lickona, T. (2004). *Character matters: how to help our children develop good judgment, integrity and other essential virtues*. New York. Toughstone.
- Masyhud, M. Sulthon dan Moh. Khusnuridlo. (2003). *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka.
- Megawangi, Ratna. (2004). *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Bandung: BPMIGAS dan Energi.
- Mulyasa. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- MU YAPPI. (2008). *Manajemen Pengembangan Pondok Pesantren*. Cet.1. Jakarta. Media Nusantara.
- Qomar, Mujamil. (2007). *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta. Erlangga.
- Raka, Gede et.al. (2011). *Pendidikan Karakter di Sekolah dari Gagasan ke Tindakan*. Jakarta. Gramedia.
- Siradj, et.al. (1999). *Pesantren Masa Depan: Wacana Pengembangan Transformasi Pesantren*. Bandung. Pustaka Hidayah.
- Tim Penyusun. *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta:Armas Duta Jaya, 2004.
- Wening, S. (2012). Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai. *Jurnal Pendidikan Karakter*.
- Wibowo, Agus. (2012). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Zubaedi. (2009). *Pendidikan Berbasis asyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Zuriah, N. (2007). *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hirokoshi, H. (1987). *Kiai dan Perubahan Sosial*. (terj. Umar Basalim, dkk.). Jakarta. P3M.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam

Nata, Abuddin. (editor). (2001). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta. PT. Grasindo.